

**PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN  
DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA  
DAERAH (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
DI ACEH)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi  
syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana

**Oleh**

**VISMA PUJA KUSUMA  
NPM : 18100035  
PRODI: AKUNTANSI**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SABANG (STIES)  
BANDA ACEH  
2021**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>I</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>II</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>III</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang dan Permasalahan .....	1
1.2. Masalah Penelitian .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Manfaat Penelitian .....	8
1.5. Skop Penelitian .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>10</b>
2.1. Kinerja Instansi Pemerintah .....	10
2.1.1. Pengertian Kinerja Instansi Pemerintah.....	10
2.1.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Instansi Pemerintah .....	11
2.1.3. Indikator Kinerja Instansi Pemerintah.....	12
2.2. Pemanfaatan Teknologi Informasi .....	14
2.2.1. Pengertian Pemanfaatan Teknologi Informasi .....	14
2.2.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemanfaatan Teknologi Informasi.....	18
2.2.3. Indikator Pemanfaatan Teknologi Informasi .....	18
2.3. Pengendalian Internal.....	19
2.3.1. Pengertian Pengendalian Internal .....	19
2.3.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengendalian Internal .....	22
2.3.3. Indikator Pengendalian Internal .....	24
2.4. Kompetensi Sumber Daya Manusia.....	26
2.4.1. Pengertian Kompetensi Sumber Daya Manusia .....	26
2.4.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sumber Daya Manusia.....	28
2.4.2. Indikator Kompetensi Sumber Daya Manusia .....	30
2.5. Penelitian Terdahulu .....	33
2.6. Kerangka Konseptual .....	34
2.6.1. Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Instansi.....	34
2.6.2. Hubungan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi .....	35
2.6.3. Hubungan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Instansi.....	36
2.7. Hipotesis Penelitian.....	37

<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
3.1. Populasi dan Sampel .....	39
3.2. Metode Penarikan Sampel .....	41
3.3. Metode Pengumpulan Data.....	41
3.4. Operasional Variabel .....	42
3.5. Skala Pengukuran.....	44
3.6. Metode Analisis Data .....	45
<b>DAFTAR PERPUSTAKAAN.....</b>	<b>51</b>

## **DAFTAR TABEL**

	<b>Halaman</b>
Tabel II.3. Penelitian Terdahulu .....	33
Tabel III.1. Populasi Penelitian .....	39

## **DAFTAR GAMBAR**

### **Halaman**

Gambar II.1. Kerangka Konseptual .....	37
--	----

## **ABSTRAK**

### **PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA DAERAH (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI ACEH)**

Nama : VISMA PUJA KUSUMA  
NPM : 18100035

**Pembimbing I : Dra. Nurhayati, M.Si, Ak. CA**  
**Pembimbing II : Endra Gunawan, SE, M.Si**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pajak daerah, retribusi daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Aceh. Permasalahan yang timbul adalah pajak daerah, retribusi daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Aceh? Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Aceh baik secara simultan maupun secara parsial.

Sampel dari penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh yang berjumlah 23 Kabupaten Kota di Aceh dengan periode 2018-2020 dengan menggunakan teknik Sensus. Variabel pajak daerah, retribusi daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah diukur dengan menggunakan rasio. Analisis data menggunakan analisis statistik model korelasi dan regresi berganda dengan bantuan *Software SPSS 25*.

Hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh antara pajak daerah, retribusi daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah. Hasil uji F diperoleh angka  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau ( $19,575 > 2,52$ ) dan uji signifikan bahwa  $p$  value sebesar  $0,000 < p$  yang ditetapkan sebesar 0,05 yang berarti signifikan. Hasil uji secara parsial menunjukkan bahwa : 1. Pajak daerah berpengaruh terhadap belanja daerah dengan signifikan  $p$  value  $0,003 <$  dari  $p$   $0,05$  berarti signifikan. 2. Retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja daerah dengan signifikan  $p$  value  $0,004 <$  dari  $p$   $0,05$  berarti signifikan. 3. Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja daerah dengan signifikan  $p$  value  $0,000 <$  dari  $p$   $0,05$  berarti signifikan .Dengan demikian pengaruh Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja Daerah lebih dominan kuat dari pada Pajak daerah dan retribusi daerah.

Hasil nilai koefisien determinasi sebesar 47,5% menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen (pajak daerah, retribusi daerah, dan Dana Alokasi Umum) dalam menjelaskan variabel dependen (belanja daerah) dan sisanya merupakan variable lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

**Kata kunci : Belanja Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Dana Alokasi Umum**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang dan Permasalahan**

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa otonomi daerah yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah meliputi hak atas otonomi mengatur kekayaan daerahnya sendiri, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 4 Ayat 1 dan 2 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah terdapat pembagian wilayah kerja yang jelas bagi daerah dalam mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahannya. Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah dituntut memiliki kinerja yang berorientasi kepada kepentingan pelayanan masyarakat, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara berkualitas dan berakuntabilitas (Sari, 2015).

Pemerintahan daerah memiliki peluang yang besar untuk mendorong demokratis karena proses desentralisasi lebih memungkinkan adanya pemerintahan yang responsif, representatif, partisipatif dan akuntabel. Untuk mewujudkan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam menjalankan otonomi daerah (Alfitriady, dkk. 2020).

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dalam siaran pers yang dilaksanakan di Banda Aceh, Jumat (30 April 2021), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat TA 2020. Penyerahan LHP ini dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh, Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA kepada Ketua DPRK Aceh Barat, Samsi Barmi dan Bupati Aceh Barat, H. Ramli, M.Si. di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Aceh, walaupun opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat TA 2020 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun ada beberapa pokok permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu (1) kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil, honorarium kegiatan, dan tunjangan perumahan pimpinan DPRK; (2) kelompok masyarakat yang menerima hibah belum menyampaikan bukti pertanggungjawaban; dan (3) kekurangan volume pekerjaan belanja modal.

Atas kelemahan-kelemahan tersebut, BPK memberi rekomendasi kepada Bupati Aceh Barat untuk melakukan langkah-langkah perbaikan antara lain: (1) kepala OPD terkait untuk menarik kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan PNS, honorarium, dan tunjangan perumahan DPRK dan menyetorkan ke kas daerah; (2) sekretaris daerah supaya memerintahkan kepala sub bagian keistimewaan aceh dan keagamaan sebagai unit pelaksana untuk meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan belanja hibah kepada penerima hibah; dan (3) kepala OPD terkait untuk menarik kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas daerah. BPK telah memberikan rekomendasi pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat atas pokok permasalahan tersebut. Oleh karena itu, BPK mendorong Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan target yang

telah ditetapkan, serta dapat memberikan manfaat kepada *stakeholders* atau pihak-pihak yang berkepentingan.

Hal ini menunjukkan bahwa saat ini kinerja instansi pemerintah Kabupaten Aceh Barat belum maksimal dilaksanakan. Adanya permasalahan tersebut maka dapat menjadi fenomena dalam penelitian ini. Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah agar senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintahan tersebut (Chintya, 2015). Kinerja instansi pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 1 ayat 32 kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasikan kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional (Zodia, 2015). Dengan demikian kinerja dapat diartikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategi suatu organisasi.

Dalam penelitiannya Zodia (2015) juga menjelaskan bahwa kinerja dapat diketahui jika individu atau kelompok individu tersebut memiliki kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan

atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa adanya tujuan serta target, kinerja seseorang atau organisasi tidak dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya. Dalam perkembangan saat ini, terminologi kinerja menjadi bagian penting dalam tahapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Nauap, dkk. (2016) menjelaskan bahwa sebagai organisasi sektor publik, pemerintah dituntut agar memberikan pelayanan terbaik serta adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintah sehingga penyelenggaraan urusan dalam organisasi lebih efisien, efektif dan bertanggungjawab.

Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menjelaskan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Menurut Nauap (2016) kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif suatu kebijakan operasional yang diambil. Dalam hal ini, dengan adanya informasi mengenai kinerja suatu instansi pemerintah, akan dapat diambil tindakan yang diperlukan seperti koreksi atas kebijakan, meluruskan kegiatan-kegiatan utama dan tugas pokok instansi, badan untuk perencanaan, menentukan tingkat keberhasilan instansi untuk memutuskan suatu tindakan dan lain-lain (Nasir dan Ranti, 2011). Untuk itulah sangat penting bagi instansi untuk mengetahui kondisi dan informasi tingkat pencapaian hasil serta mengetahui dampak positif dan negatif suatu kebijakan operasional agar dapat diambil tindakan seperti koreksi atas kebijakan,

meluruskan kegiatan-kegiatan utama dan tugas pokok instansi sehingga penyelenggaraan tata kelola berjalan dengan baik.

Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi kinerja instansi pemerintah yaitu pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia. Teknologi informasi dan pengendalian internal secara fisik adalah dua hal yang berbeda, tetapi teknologi informasi dapat digunakan sebagai alat untuk mempermudah dalam melakukan pengendalian internal dan bukan berarti tanpa teknologi informasi pengendalian internal tidak bisa dijalankan, tetapi bisa dijalankan hanya saja dengan teknologi informasi akan jauh lebih memudahkan karena terdapat hal-hal yang sulit digapai oleh pengendalian internal secara manual, sehingga dengan pemanfaatan teknologi informasi semuanya bisa dilakukan secara efisien baik dari segi waktu, tenaga kerja, dan juga efisien dari segi biaya (Nauap, dkk. : 2016). Oleh karena itu, segala hal yang berhubungan dengan pengendalian internal sudah harus dijalankan dengan menggunakan teknologi informasi. Beberapa penelitian yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja instansi pemerintah, seperti penelitian yang dilakukan Chintya (2015). Dari hasil penelitiannya diperoleh hubungan yang positif bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

Selain dua faktor tersebut, kompetensi sumber daya manusia juga termasuk salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja instansi pemerintah. Kompetensi merupakan suatu kemampuan untuk mencapai kinerja serta untuk menghasilkan suatu keluaran baru (*output*) dan hasil-hasil yang diperoleh (*outcomes*). Menurut Indriasih (2014), sumber daya manusia adalah pilar

penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi tujuannya. Suatu sistem yang baik tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak ditunjang oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai, khususnya kualitas pribadi sumber daya manusia yang terdiri dari potensi pendidikan, pengalaman, dan pelatihan. Menurut Ningrum (2018), kompetensi sumber daya manusia merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki suatu kemampuan khusus, keterampilan, pengetahuan, dan memiliki suatu tanggung jawab. Yendrawati (2013) juga menjelaskan bahwa kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten (Studi Pada Satuan Kinerja Perangkat Kabupaten Aceh Barat).”**

## **1.2. Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten (Studi Pada Satuan Kinerja Perangkat Kabupaten Aceh Barat)?

2. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten (Studi Pada Satuan Kinerja Perangkat Kabupaten Aceh Barat)?
3. Apakah Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten (Studi Pada Satuan Kinerja Perangkat Kabupaten Aceh Barat)?
4. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten (Studi Pada Satuan Kinerja Perangkat Kabupaten Aceh Barat)?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia secara simultan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten (Studi Pada Satuan Kinerja Perangkat Kabupaten Aceh Barat).
2. Untuk mengetahui pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten (Studi Pada Satuan Kinerja Perangkat Kabupaten Aceh Barat).
3. Untuk mengetahui pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten (Studi Pada Satuan Kinerja Perangkat Kabupaten Aceh Barat).

4. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten (Studi Pada Satuan Kinerja Perangkat Kabupaten Aceh Barat).

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu:

##### **1.4.1. Manfaat Praktis**

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi Pemerintah Kabupaten/Kota khususnya Kabupaten Aceh Barat dan Provinsi Aceh dalam mempertanggungjawabkan hasil kinerja di setiap instansi pemerintahan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan variabel sesuai dengan judul penelitian ini yaitu Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten.

##### **1.4.2. Manfaat Teoritis**

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan untuk peneliti selanjutnya mengenai pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja instansi pemerintah kabupaten. Sehingga dapat menjadi referensi baru untuk penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian lebih lanjut atau sejenis. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi generalisasi pada penelitian sejenis menggunakan objek yang berbeda.

### **1.5. Skop Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis mengambil skop pada bidang ilmu ekonomi dengan konsentrasi akuntansi sektor publik sesuai dengan judul penelitian ini yaitu Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten (Studi Pada Satuan Kinerja Perangkat Kabupaten Aceh Barat).